

Pembelajaran Proyek Pesisir Lampung

Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir,
Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir,
Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat
1998 - 2003



Pembelajaran Proyek Pesisir Lampung

**Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir,
Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan Berbasis Masyarakat
1998 - 2003**

Penyunting:

Dietrich G. Bengen
Budy Wirawan
Amiruddin Tahir

Tata letak/cover:

Pasus Legowo

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID
sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS
Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan USAID/CRC-URI Program Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir (CRMP)

4. Penyebarluasan informasi (nilai 2)

Meskipun program daerah perlindungan laut baru berjalan sekitar 12 bulan, namun berbagai kalangan telah banyak mengetahui tentang keberadaan program tersebut. Hal ini dikarenakan pengelola program ini giat menyebarluaskan berbagai informasi tentang program ini. Secara berkala informasi dari program daerah perlindungan laut disajikan pada media “Warta Pesisir dan Lautan” yang diterbitkan oleh PKSPL-IPB setiap 3 bulan. Selain itu, pengelola juga aktif menyebarluaskan melalui media cetak setempat seperti Lampung Pos dan media elektronik seperti TVRI stasiun Lampung. Penyebarluasan informasi juga dilakukan dengan mengundang pihak-pihak luar untuk melihat perkembangan program daerah perlindungan laut. Pihak luar yang telah diundang terutama *stakeholders* di Provinsi Lampung seperti Pemda (Dinas terkait), LSM dan media massa. Diharapkan dengan kedatangan *stakeholders* ini ke Pulau Sebesi dapat meningkatkan penyebarluasan informasi tentang program ini.

Dilihat dari aksesibilitas, untuk mencapai lokasi pengembangan daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi ini relatif mudah, karena dapat ditempuh selama ± 3 jam dari kota Bandar Lampung, yaitu 1,5 jam kendaraan darat dan 1,5 jam kendaraan laut. Transportasi umum ke lokasi ini juga tersedia secara reguler, dimana angkutan darat tersedia dari Kota Kalianda menuju Pelabuhan Canti. Sedangkan transportasi laut secara reguler tersedia dari pagi hingga siang hari.

Untuk mengetahui peluang kemungkinan replikasi dari program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pada Tabel 7 disajikan ringkasan penilaian aspek replikabilitas tersebut. Seperti terlihat pada Tabel 7, total nilai keempat parameter yang digunakan dalam menilai peluang replikasi adalah 2,50. Dengan demikian, peluang replikasi program ini berada pada kategori tinggi.

Tabel 7. Ringkasan penilaian replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/variabel	Bobot	Skor	Jumlah
1.	Kelengkapan data dasar (<i>baseline data</i>)	0,30	3	0,90
2.	Relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi dan situasi lokasi	0,20	3	0,60
3.	Dampak proyek terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan perilaku	0,30	2	0,60
4.	Penyebarluasan	0,20	2	0,40
Total		1,00		2,50

Pulau Sebesi. Penyusunan Rencana Pengelolaan ini didasarkan pada isu yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dituangkan dalam Profil Sumberdaya Pesisir Pulau Sebesi. Profil ini juga memuat berbagai macam data dan informasi seperti kependudukan, mata pencaharian, kelembagaan, aktivitas perekonomian dan sumberdaya wilayah pesisir.

Untuk mendukung program evaluasi pengembangan program daerah perlindungan laut ini, digunakan beberapa indikator pemantauan, yaitu persen penutupan karang dan indikator biologi (ikan target) untuk mengetahui dampak daerah perlindungan laut terhadap perbaikan lingkungan. Sedangkan untuk mengetahui dampak daerah perlindungan laut terhadap perbaikan sosial ekonomi masyarakat digunakan indikator hasil tangkapan nelayan. Pada tahap awal telah dilakukan survei yang dilakukan oleh pengelola daerah perlindungan laut dan masyarakat untuk mendapatkan data awal (kondisi awal) lokasi. Data awal ini digunakan sebagai data pembandingan dalam mengevaluasi program daerah perlindungan laut.

Pengembangan daerah perlindungan laut awalnya berasal dari kesadaran masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Hal ini didasarkan atas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya ekosistem terumbu karang bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat menyadari bahwa meningkatnya aktivitas yang merusak terumbu karang akan berdampak pada musnahnya ekosistem tersebut. Kerusakan terumbu karang selanjutnya akan berdampak terhadap mata pencaharian mereka. Dengan demikian, hubungan sebab akibat dari keberadaan ekosistem terumbu karang dengan kondisi sosial ekonomi sangat dipahami oleh masyarakat dan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi.

2. Relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi dan situasi lokasi (nilai 3)

Sebagai masyarakat kepulauan, masyarakat Pulau Sebesi menyadari bahwa keberadaan terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, karena sebagian besar dari mereka yang hidup sebagai nelayan mencari ikan di kawasan ekosistem tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program daerah perlindungan laut akan melindungi mata pencaharian mereka. Dalam pengembangannya, daerah perlindungan laut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pulau Sebesi, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, ketika inisiator program menyampaikan maksud dan tujuan dari program ini, masyarakat memberikan dukungannya. Pada awalnya, lokasi daerah perlindungan laut hanya difokuskan pada satu tempat, yaitu di depan Dusun Sianas, namun karena masyarakat dari dusun lain meminta, maka lokasi daerah perlindungan laut diperluas menjadi empat lokasi, yaitu masing-masing di dusun Tejang, dan dusun Segenom. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah perlindungan laut ini merupakan kebutuhan masyarakat Pulau Sebesi.

3. Dampak proyek terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan perilaku masyarakat (nilai 2)

Pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi sampai saat ini baru menunjukkan dampak secara signifikan terhadap perubahan sikap masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir dan penurunan tekanan terhadap sumberdaya tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam program daerah perlindungan laut dan keinginan mereka untuk melindungi wilayah perairan dari aktivitas yang bersifat destruktif, seperti penggunaan bom, potassium dan gardan. Sedangkan ditinjau dari segi lingkungan, dampak terhadap perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan program daerah perlindungan laut baru berjalan efektif selama 12 bulan, sehingga dampak terhadap perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat belum dapat dievaluasi.

dilakukan oleh masyarakat luar di sekitar kawasan pesisir Pulau Sebesi berkurang berkat adanya pengawasan dari masyarakat. Artinya program daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi memberikan dampak terhadap perubahan sikap masyarakat dan penurunan aktivitas yang merusak lingkungan.

Ringkasan penilaian akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan penilaian terhadap ketiga parameter yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas, dapat dikatakan bahwa pengembangan program daerah perlindungan laut memiliki tingkat akuntabilitas sedang, yang diindikasikan oleh total nilai skor ketiga parameter yang berada pada kisaran 1,10 - 2,00. Kategori ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena indikator efektifitas program dapat dievaluasi manakala program ini telah berjalan dengan rentang waktu yang memadai (2 tahun), terutama untuk mengevaluasi dampak terhadap perbaikan lingkungan (ekosistem

Tabel 6. Ringkasan penilaian akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/variabel	Bobot	Skor	Jumlah
1.	Efisiensi program daerah perlindungan laut	0,40	3	1,20
2.	Proses implementasi	0,20	2	0,40
3.	Efektifitas program dan proyek	0,40	1	0,40
Total		1,00		2,00

terumbu karang dan sumberdaya ikan karang) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun tingkat akuntabilitas masih dalam kategori sedang, namun hal terpenting dari pengembangan program daerah perlindungan laut ini adalah pelaksanaan program selama ini telah dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang telah disusun dengan komunikasi antara pelaksana program dan pemberi dana, sehingga nilai-nilai transparansi dan keterbukaan yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan program dapat diterapkan.

ANALISIS ASPEK REPLIKABILITAS

Untuk melihat kemungkinan program daerah perlindungan laut direplikasi di lokasi lain, analisis difokuskan pada empat parameter seperti diuraikan sebelumnya. Hasil penilaian dari setiap parameter untuk aspek replikabilitas berkisar antara 1 sampai 3, yang didasarkan pada indikator dari setiap

parameter tersebut. Berikut adalah uraian dari masing-masing parameter penilaian aspek replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Kelengkapan data dasar (nilai 3)

Untuk mendukung program daerah perlindungan laut dan pengelolaan Pulau Sebesi secara luas, disusun Rencana Pengelolaan Pulau Sebesi yang saat ini sedang dipersiapkan oleh masyarakat



ANALISIS ASPEK AKUNTABILITAS

Seperti halnya dengan penilaian terhadap aspek keberlanjutan, penilaian terhadap akuntabilitas program daerah perlindungan laut juga berkisar antara 1 sampai 3. Nilai tersebut didasarkan atas indikator dari masing-masing parameter yang digunakan dalam menilai aspek akuntabilitas. Berikut adalah uraian dari masing-masing parameter untuk menilai akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Efisiensi program daerah perlindungan laut (nilai 3)

Seperti halnya dengan program-program lainnya yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir, program daerah perlindungan laut memiliki kerangka kerja secara umum yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Proyek Pesisir Lampung, dimana program daerah perlindungan laut merupakan program yang dicanangkan pada Program Kerja Tahun ke 5 (2001-2002) (Workplan Year 5). Rencana kerja tahunan selanjutnya dijabarkan menjadi rencana kerja bulanan (monthly activity/program). Kerangka kerja yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan menyangkut aspek tujuan, *output*, dan waktu pelaksanaan setiap program. Agar kerangka kerja tersebut lebih operasional, maka dijabarkan secara rinci berdasarkan kerangka waktu yang tersedia.

Demikian juga halnya dengan sistem pendanaan, penanggungjawab program mengajukan permintaan dana kepada pemberi dana berdasarkan kerangka kerja bulanan yang telah dirinci. Anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan berdasarkan volume pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan. Pertanggungjawaban anggaran dilakukan pada bulan berikutnya. Dengan demikian, akuntabilitas dari penggunaan dana dalam pengembangan daerah perlindungan laut cukup baik. Apabila terjadi perubahan-perubahan, maka pihak pengelola dan pemberi dana dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Adanya komunikasi yang berjalan lancar antara pengelola dan pemberi dana, sangat membantu dalam menangani kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program ini.

2. Proses implementasi (nilai 2)

Sejalan dengan pengembangan program daerah perlindungan laut, inisiator program juga menyiapkan kerangka monitoring untuk memantau keberhasilan dari implementasi program tersebut. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan dari ekosistem terumbu karang dan biota-biota laut yang berasosiasi di dalamnya. Untuk menyiapkan kerangka monitoring, staf lapangan memberikan bantuan teknis kepada pengelola bagaimana melakukan kegiatan monitoring. Diharapkan hasil monitoring tersebut akan dijadikan bahan bagi perbaikan program daerah perlindungan laut.

Dalam proses implementasi program daerah perlindungan laut, komunikasi antara pemberi dana, pengelola dan masyarakat dilakukan dalam dua arah, dalam arti masyarakat dan pengelola (melalui Program Manajer Lapangan) memberikan laporan bulan kepada pemberi dana. Berdasarkan laporan tersebut pemberi dana melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola program di lapangan.

3. Efektifitas program daerah perlindungan laut (nilai 1)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa secara fisik dampak program daerah perlindungan laut terhadap perbaikan lingkungan belum dapat dinilai secara jelas, karena program ini baru berjalan selama 12 bulan. Namun dampak yang terlihat adalah adanya perubahan sikap masyarakat ke arah positif dalam mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Hal ini diindikasikan berkurangnya kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara destruktif dan perubahan kualitas sumberdaya terumbu karang dan ikan karang. Demikian juga kegiatan destruktif lainnya yang

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Tabel 5 disajikan ringkasan penilaian tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Pada Tabel 5 tersebut terlihat bahwa total perkalian antara bobot dan skor kesepuluh parameter untuk menilai tingkat keberlanjutan adalah 2,380. Hal ini berarti bahwa indikasi keberlanjutan program daerah perlindungan laut ini cukup tinggi. Dengan demikian, harapan akan keberlanjutan program daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi setelah Proyek Pesisir berakhir cukup tinggi.

Tabel 5. Ringkasan penilaian tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/Variabel	Bobot	Skor	Jumlah
A.	Aspek Biofisik	0,333		
	1. Dampak terhadap ekosistem terumbu karang	0,167	1	0,334
	2. Dampak terhadap sumberdaya ikan	0,167	2	0,334
B.	Aspek Sosial Ekonomi Budaya	0,333		
	1. Dampak terhadap sosial budaya masyarakat	0,250	3	0,750
	2. Dampak terhadap pengembangan usaha	0,083	1	0,083
C.	Aspek Kelembagaan	0,333		
	1. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat	0,093	2	0,186
	2. Komitmen Pemerintah Daerah	0,093	3	0,279
	3. Kapasitas institusi setempat	0,029	2	0,058
	4. Peningkatan sumberdaya manusia	0,031	3	0,093
	5. Partisipasi dari <i>stakeholders</i> utama	0,083	3	0,249
	6. Hubungan dengan donor lain	0,014	1	0,014
	Jumlah	1,00		2,380

Indikasi tingkat keberlanjutan sebagaimana diuraikan di atas, belum menjadi jaminan bahwa program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi Proyek Pesisir selama penyiapan program ini. Diperlukan upaya-upaya lain yang dapat menjaga agar program ini benar-benar terus berlanjut, sehingga tujuan dari perlindungan sumberdaya alam pesisir Pulau Sebesi dapat dicapai. Dalam konteks strategi pengembangan daerah perlindungan laut setelah berakhirnya bantuan inisiator proyek, terdapat tiga strategi yang diidentifikasi oleh inisiator proyek. Dari ketiga strategi tersebut kemudian dinilai oleh *stakeholders* mana yang paling prioritas untuk dijalankan menurut mereka guna menjaga keberlanjutan program daerah perlindungan laut ini. Ketiga strategi tersebut berdasarkan urutan prioritas, sebagaimana disajikan pada Gambar 5, adalah sebagai berikut:

- **Prioritas Pertama:** Mengembangkan mata pencaharian alternatif sebagai kompensasi dari tidak dimanfaatkannya sumberdaya pesisir yang terdapat di kawasan daerah perlindungan laut. Mata pencaharian alternatif yang disarankan adalah pengembangan keramba terutama keramba dasar, pengembangan rumpon dan pengembangan pengolahan hasil-hasil laut.
- **Prioritas Kedua:** Internalisasi program daerah perlindungan laut ke dalam program tahunan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan daerah perlindungan laut senantiasa mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah.
- **Prioritas Ketiga:** adanya program pendampingan lanjutan oleh lembaga donor lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir selama ini.

menempatkan penyuluh lapangan di Pulau Sebesi. Sedangkan partisipasi tingkat pemilik terjadi pada saat inisiator sudah membentuk Kelompok Badan Pengelola. Setelah berjalan sekitar setahun, inisiator program telah membentuk Badan Pengelola daerah perlindungan laut yang beranggotakan 22 orang yang berasal dari masyarakat Pulau Sebesi.

Semenjak dibentuk, Badan Pengelola inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Inisiator program melalui staf penyuluh lapangan hanya menjadi pendamping dalam meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Pengelola. Dengan demikian, tingkat partisipasi dari *stakeholders* dalam program daerah perlindungan laut ini adalah sebagai pemilik dan diharapkan mampu menjalin kerjasama antar lembaga yang ada di Pulau Sebesi sehingga tercipta sistem pengelolaan yang terpadu di antara komponen *stakeholders*.

10. Hubungan dengan donor lain (nilai 1)

Salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan program daerah perlindungan laut adalah adanya program-program sinergis yang terdapat di sekitar lokasi. Program-program yang sinergis ini diharapkan dapat mengurangi tekanan atau mengalihkan tekanan dari kawasan yang dilindungi ke lokasi kegiatan lain yang sinergis tersebut. Saat ini, program-program pengelolaan pesisir yang terdapat di sekitar lokasi daerah perlindungan laut yang sejalan dengan program daerah perlindungan laut adalah pembuatan terumbu buatan yang didanai oleh *Nihon University* Jepang. Program terumbu buatan ini dapat menjadi lokasi penelitian untuk tujuan ilmiah yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan terumbu karang di Pulau Sebesi. Kegiatan lainnya yang berjalan sinergis dengan program daerah perlindungan laut adalah pemasangan rumpon oleh nelayan setempat. Pemasangan rumpon di luar kawasan daerah perlindungan laut ini akan mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan daerah perlindungan laut. Masyarakat yang selama ini melakukan penangkapan ikan di kawasan daerah perlindungan laut akan memindahkan lokasi penangkapan ikan pada lokasi dimana terdapat rumpon yang telah dipasang oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan daerah perlindungan laut tidak mengganggu mata pencaharian nelayan setempat.

Selain kedua program di atas, pengelola daerah perlindungan laut juga saat ini sedang menjajaki kemungkinan mendapatkan dana dari donor lain, seperti Pemerintah Daerah Lampung Selatan, melalui pengajuan proposal untuk mendapatkan dana rutin pengelola sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun. Untuk meningkatkan kemampuan Badan Pengelola dalam rangka mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lain, terutama pada saat Proyek Pesisir berakhir, maka staf penyuluh lapangan saat ini membantu Badan Pengelola untuk menyusun proposal yang akan disampaikan ke lembaga-lembaga donor. Diharapkan setelah Proyek Pesisir berakhir Badan Pengelola telah mendapatkan lembaga baru yang dapat membantu menyediakan dana operasional.



Terumbu buatan di Pulau Sebesi



Pelatihan penyiapan Kader Pengelola Pesisir dan Laut

kader di Desa Tejang Sebesi dan Pematang Pasir; (3) pelatihan pengolahan hasil perikanan tradisional; dan (4) pelatihan monitoring (manta tow). Program-program di atas, secara langsung atau tidak langsung telah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di Pulau Sebesi, terutama dalam hal (a) terbentuknya Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut; (b) kemampuan masyarakat membuat aturan pengelolaan daerah perlindungan laut; dan (c) kemampuan memahami permasalahan pengelolaan terumbu karang (monitoring terumbu karang).

Program lain yang dilakukan adalah program pendampingan masyarakat yang akan membantu masyarakat setempat dalam mempersiapkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu (1) penempatan *Extension Officer* (penyuluh lapangan dari luar Pulau Sebesi) satu orang mulai dari awal sampai akhir; dan (2) pengangkatan

asisten penyuluh lapangan dari masyarakat setempat (dua orang). Penyuluh lapangan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen proyek dan masyarakat desa. Tugas penyuluh lapangan adalah (a) fasilitator dan mediator antara Proyek Pesisir, pemerintah dan masyarakat; (b) membantu proses pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan tanggungjawab terhadap proyek; dan (c) membangun motivasi masyarakat desa dalam upaya pengelolaan pesisir.

Selain program pendampingan, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis. Bantuan teknis yang telah dilakukan adalah (a) tenaga asistensi monitoring terumbu karang (Mahasiswa IPB); (b) pelatihan pengolahan ikan; dan (c) pelatihan tentang organisasi. Pelatihan monitoring terumbu karang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dan pengelola daerah perlindungan laut bagaimana melakukan monitoring terumbu karang. Pelatihan organisasi dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Bentala yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berorganisasi dan pemahaman tentang posisi dan kekuatan dari suatu organisasi. Sedangkan pelatihan pengolahan ikan dilaksanakan oleh jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi ibu-ibu tentang bagaimana mengolah ikan dengan mutu yang baik.

9. Partisipasi *Stakeholders* (nilai 3)

Ketika inisiator program menetapkan Pulau Sebesi sebagai lokasi implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah adanya keinginan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Alasannya adalah apabila kriteria ini dipenuhi, maka diharapkan program-program perlindungan sumberdaya laut akan mudah diterima oleh masyarakat dan tentunya keterlibatan mereka dalam program tersebut tinggi. Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengelolaan pesisir, terdapat tiga tingkatan partisipasi, yaitu partisipasi sebatas pada memberi informasi (tingkat informasi), partisipasi sebatas target konsultasi, dan partisipasi sebagai pemilik program. Dalam pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, partisipasi tingkat informasi terjadi pada saat inisiator program akan memilih satu pulau dari beberapa pulau untuk dijadikan lokasi implementasi program. Partisipasi tingkat konsultasi terjadi pada saat inisiator baru mulai

yang melakukan pembinaan akan arti penting lingkungan dan wadah aspirasi bagi anggotanya. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang ada di Desa Tejang. Koperasi Tani dan Nelayan merupakan koperasi yang ada di Desa Tejang yang saat ini belum aktif dan hanya mengelola hasil Nilam dengan modal dari investor yang berasal dari Jakarta. Keamanan Laut merupakan organisasi yang dibentuk oleh desa di tiap-tiap dusun pada tahun 1999 atas dasar kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penjagaan lingkungan dari pengrusakan. Organisasi ini bertugas untuk menjaga laut dari pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan luar atau pun nelayan Pulau Sebesi itu sendiri.

Sikam Salamban dan Sikam Muahi merupakan organisasi sosial yang beranggotakan beberapa keluarga guna menghimpun dana untuk digunakan oleh anggota yang tertimpa musibah seperti sakit dan meninggal dunia dan keperluan hajatan. Risma merupakan organisasi pemuda yang berbasis masjid, organisasi ini berada di tiap-tiap masjid yang berada pada tiga dusun. Risma melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari besar umat Islam, seperti peringatan Isra' Mi'raj Maulud Nabi, kegiatan Bulan Ramadhan dan beberapa kegiatan lainnya.

Dalam konteks pengelolaan daerah perlindungan laut, inisiator program telah membentuk sebuah lembaga baru yang disebut dengan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut (DPL) Pulau Sebesi. Adapun tugas dari badan pengelola ini adalah :

- Membuat perencanaan pengelolaan daerah perlindungan laut yang disetujui oleh masyarakat melalui keputusan bersama.
- Bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Wilayah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- Mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
- Melakukan pengawasan dan berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
- Melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama masyarakat.

8. Penguatan Sumberdaya Manusia (nilai 3)

Pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi juga diikuti program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pendampingan dan penyediaan bantuan teknis. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang telah dilaksanakan adalah (1) pengiriman anggota masyarakat ke Sulawesi Utara untuk studi banding tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Desa Blongko, Talise, dan Taman Nasional Bunaken; (2) pelatihan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat untuk penyiapan



manusia. Sementara pada tingkat Kabupaten, program daerah perlindungan laut sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Selatan, sebagai bagian dari Program Pengawasan, Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Pada tingkat di desa, program daerah perlindungan laut sesuai dengan kebijakan pengamanan laut, yaitu Surat Keputusan Keamanan Laut : SK No. 66/RN-SBG/VI 1999 yang memuat tiga keputusan, yaitu (1) menggalang kesatuan dan kekompakan anggota nelayan; (2) membentuk tiga regu keamanan laut yang beranggotakan 45 orang; dan (3) menangani permasalahan-permasalahan pengelolaan laut.

Meskipun program daerah perlindungan laut sesuai dengan kebijakan setempat, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus yang dikeluarkan untuk mendukung program tersebut, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa. Upaya untuk menerbitkan aturan khusus untuk mendukung program daerah perlindungan laut saat ini sedang dipersiapkan. Pada tingkat desa, Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi akan menerbitkan Keputusan Desa yang akan mengatur pelaksanaan daerah perlindungan laut tersebut. Sedangkan pada tingkat kabupaten, sedang dipersiapkan Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang mana program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi akan dimasukkan dalam materi Peraturan Daerah tersebut.

6. Komitmen institusi setempat mengelola daerah perlindungan laut (nilai 3)

Dari beberapa institusi yang selama ini terlibat dalam program-program pengelolaan pesisir di Provinsi Lampung, seperti pemerintah melalui lembaga terkait (Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, pada umumnya memiliki komitmen untuk mendukung program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Namun demikian, masing-masing lembaga akan memberikan komitmen dan bantuan sesuai dengan fungsinya. Lembaga-lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi akan lebih fokus pada fungsi koordinasi, sedangkan pada tingkat kabupaten akan memberikan bantuan melalui integrasi program-program lembaga yang mendukung program daerah perlindungan laut tersebut. Demikian juga dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan membantu sesuai dengan fungsi dan peran, seperti bantuan teknis dan ilmiah oleh Perguruan Tinggi dan penguatan keswadayaan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hingga tahun 2002, baik lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat belum memiliki program-program pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mendukung pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2002, berbagai program pengembangan daerah perlindungan laut tersebut masih lebih banyak dilakukan oleh Proyek Pesisir. Namun pada tahun 2003, pada saat inisiator program (Proyek Pesisir) berakhir, maka lembaga-lembaga tersebut akan memberikan bantuannya. Pada tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung akan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah perlindungan laut. Sedangkan pada tahun 2002 ini, program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi adalah program Sistem Pengawasan Masyarakat dan Operasi laut untuk Pengawasan.

7. Kemampuan Institusi setempat dalam mengelola daerah perlindungan laut (nilai 2)

Institusi setempat (yang terdapat di Pulau Sebesi) terdiri dari intitusi formal dan non formal. Institusi formal yang ada antara lain adalah Rukun Nelayan, Karang Taruna, Koperasi Tani dan Nelayan, dan Seksi Keamanan. Sedangkan institusi non formal adalah Sikam Salamban, Sikam Muahi, dan Risma. Rukun Nelayan Mina Bahari Pulau Sebesi merupakan organisasi nelayan yang ada di Pulau Sebesi yang beranggotakan sekitar 100 orang nelayan. Organisasi ini merupakan organisasi

3. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan aspek sosial budaya masyarakat (nilai 3)

Masyarakat Pulau Sebesi pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh yang mencapai 57 % dari jumlah penduduk Pulau Sebesi atau sekitar 365 jiwa. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani sekitar 33 % atau sebanyak 217 jiwa. Selebihnya adalah pedagang, wiraswasta dan pegawai negeri (Pemda Lampung, 2002). Dari gambaran di atas, terlihat bahwa sedikitnya sekitar 217 jiwa memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya pesisir (sumberdaya ikan dan biota lainnya) untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, umumnya memiliki alat tangkap sederhana (perahu dan alat tangkap). Dengan demikian, umumnya lokasi penangkapan (fishing ground) nelayan Pulau Sebesi berada di sekitar Pulau Sebesi (sekeliling pulau) dan merupakan kawasan dimana terdapat ekosistem terumbu karang. Dengan demikian, kerusakan terumbu karang akan mempengaruhi mata pencaharian mereka. Pengembangan program daerah perlindungan laut ini secara sosial ekonomi tentunya sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Sebesi. Kerusakan terumbu karang akan berdampak terhadap kelangsungan mata pencaharian nelayan di Pulau Sebesi.

Kesesuaian program daerah perlindungan laut dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat juga tercermin dari hasil studi yang dilakukan oleh Izaryadi (2001) yang mengkaji tingkat partisipasi masyarakat Pulau Sebesi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 47 % masyarakat nelayan Pulau Sebesi memiliki peran yang sangat besar dalam pelestarian sumberdaya terumbu karang dengan mencegah tindakan-tindakan destruktif, seperti penggunaan bom, sianida, dan pengoperasian gardan oleh nelayan dari luar Pulau Sebesi. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang erat antara mata pencaharian nelayan dengan pemahaman terhadap ekosistem terumbu karang. Artinya masyarakat Pulau Sebesi yang berprofesi sebagai nelayan utama (tidak memiliki mata pencaharian selain menangkap ikan) memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap ekosistem terumbu karang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program daerah perlindungan laut yang bertujuan melindungi ekosistem terumbu karang dari berbagai kegiatan yang bersifat destruktif, tentunya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat setempat, baik yang secara langsung terkait dengan keberadaan terumbu karang (nelayan) maupun yang tidak terkait secara langsung.

4. Dampak Daerah perlindungan laut terhadap pengembangan usaha alternatif (Nilai 1)

Di dalam konsep pengembangan dan pengelolaan daerah perlindungan laut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengembangan usaha-usaha alternatif yang sifatnya sinergis. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pengembangan usaha yang cukup relevan adalah pengembangan daerah wisata bahari. Hal ini memungkinkan karena Pulau Sebesi terletak di sekitar kawasan Gunung Krakatau. Apabila program daerah perlindungan laut ini berhasil dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kualitas terumbu karang, maka Pulau Sebesi akan menjadi lokasi kunjungan wisata bahari khususnya wisata selam. Mengingat kondisi terumbu karang di sekitar Selat Sunda pada umumnya telah mengalami kerusakan.

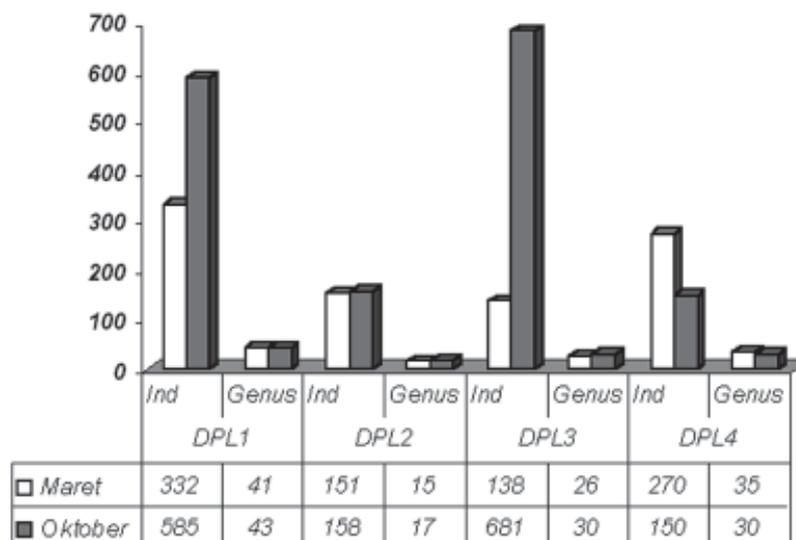
5. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat (nilai 2)

Secara umum program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan setempat, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa. Bahkan tujuan dari program daerah perlindungan laut sejalan dengan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Lampung. Pada kebijakan tingkat Provinsi Lampung, daerah perlindungan laut sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2000 dengan kebijakan pemulihan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

Dampak lainnya adalah adanya kesepakatan masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari nelayan luar yang menggunakan alat tangkap dasar dan merusak terumbu karang. Perubahan sikap yang mendasar juga terlihat dari cara-cara penyelesaian sengketa antara nelayan luar (yang menggunakan gardan) dengan masyarakat Pulau Sebesi. Contoh kasus adalah penyelesaian masalah antara nelayan dari Desa yang tertangkap oleh nelayan Pulau Sebesi karena menggunakan alat tangkap gardan. Penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Selatan, Angkatan Laut dan Rukun Nelayan dari kedua pihak. Sebagai hasil kesepakatannya adalah nelayan yang menggunakan gardan diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pengelola Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi. Dengan demikian, dampak secara nyata dari pengembangan daerah perlindungan laut adalah penurunan kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif.

2. Dampak Daerah Perlindungan Laut Terhadap Peningkatan Sumberdaya Ikan (nilai 2)

Hasil penelitian Prasetiawan (2002) menunjukkan adanya hubungan antara kualitas terumbu karang dengan kelimpahan dan jumlah genus ikan karang yang terdapat di daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Artinya apabila program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi mampu meningkatkan kualitas terumbu karang (persen penutupan karang hidup), akan secara langsung juga akan meningkatkan kualitas sumberdaya ikan karang. Berdasarkan hasil pemantauan ikan karang yang dilakukan pada bulan Maret dan Oktober 2002 menunjukkan adanya peningkatan jumlah spesies dan jumlah genus pada beberapa lokasi daerah perlindungan laut. Seperti pada Gambar 6, terlihat



Gambar 6. Perbandingan jumlah individu dan genus ikan karang hasil monitoring Bulan Maret dan Oktober 2002 di Pulau Sebesi.

terjadi peningkatan jumlah individu yang ditemukan pada DPL 1, 2 dan 3 dalam selang waktu Maret - Oktober 2002. Demikian juga jumlah genus yang ditemukan terjadi peningkatan pada DPL 1, 2 dan 3. Hal ini berarti pengembangan daerah perlindungan laut memberikan dampak terhadap peningkatan sumberdaya ikan karang. Pengembangan daerah perlindungan laut juga secara nyata memberikan dampak terhadap penurunan aktivitas pemanfaatan ikan karang dengan menggunakan teknik yang merusak seperti bom dan sianida.

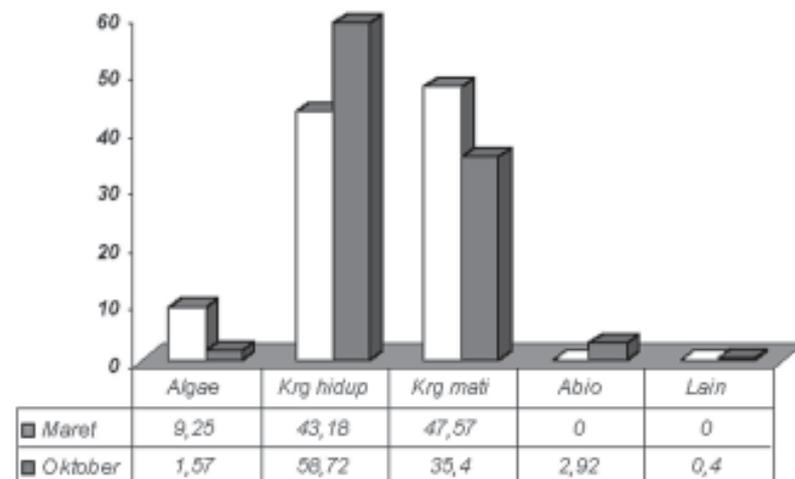
ANALISIS ASPEK KEBERLANJUTAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 parameter untuk menilai tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi diperoleh nilai skor berkisar antara 1 sampai 3. Nilai skor tersebut didasarkan pada sejumlah informasi yang menjadi indikator penilaian dari setiap parameter yang digunakan dalam menilai tingkat keberlanjutan. Berikut adalah uraian dari setiap parameter untuk menentukan tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Dampak Daerah Perlindungan Laut Terhadap Perbaikan Kualitas Ekosistem Terumbu Karang (Nilai 2)

Secara konseptual daerah perlindungan laut bertujuan untuk melindungi sumberdaya laut melalui perlindungan kawasan terumbu karang dari berbagai kegiatan yang merusak. Oleh karena itu, dalam jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya pesisir dan selanjutnya memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbaikan kualitas ekosistem terumbu karang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun bagisosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi yang baru berjalan sekitar 12 bulan (Januari 2002), belum memperlihatkan perubahan yang signifikan dari perubahan kualitas lingkungan (ekosistem terumbu karang). Perubahan lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut belum dapat dinilai secara jelas. Namun demikian, dari hasil monitoring yang dilakukan pada Bulan Maret dan Oktober 2002, telah menunjukkan adanya perbaikan kualitas terumbu karang. Seperti terlihat pada Gambar 5, terjadi peningkatan persen penutupan karang hidup, dari 43,18 % menjadi 58,72 %, dan sebaliknya terjadi penurunan persen penutupan karang mati dari 47,57 % menjadi 35,4 %. Hal ini menunjukkan adanya dampak pengembangan daerah perlindungan laut terhadap perbaikan kualitas terumbu karang.

Dampak yang signifikan dari program pengembangan daerah perlindungan laut ini adalah adanya perubahan sikap dan pemahaman masyarakat setempat yang juga mempengaruhi perilaku masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir. Sebelum pengembangan program daerah perlindungan laut ini, beberapa masyarakat Pulau Sebesi masih melakukan kegiatan penangkapan dengan cara destruktif seperti penggunaan bom dan alat tangkap gardan. Namun semenjak adanya kegiatan pengembangan daerah perlindungan laut, perilaku yang bersifat merusak terus berkurang.



Gambar 5. Perbandingan kualitas terumbu karang hasil monitoring Bulan Maret dan Oktober 2002 di Pulau Sebesi pada kedalaman 3 m.

Untuk parameter biofisik, baik yang berdampak terhadap terumbu karang maupun terhadap sumberdaya ikan memiliki bobot yang sama. Artinya tingkat kepentingan kedua parameter tersebut sama besar dalam menentukan keberlanjutan program Daerah Perlindungan Laut. Untuk parameter sosial ekonomi budaya, dampak terhadap sosial budaya lebih penting dibandingkan dampak terhadap pengembangan usaha alternatif. Sementara untuk parameter aspek kelembagaan, kesesuaian dengan kebijakan setempat, komitmen pemerintah daerah dan institusi lokal lainnya serta partisipasi masyarakat dipandang lebih penting dibandingkan tiga parameter yang lain, yaitu hubungan dengan donor lain, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas institusi lokal.

Dengan pendekatan yang sama, dilakukan penentuan bobot untuk parameter penilaian akuntabilitas dan replikabilitas program daerah perlindungan laut. Secara ringkas penentuan bobot untuk setiap parameter disajikan pada Tabel 4. Untuk penentuan nilai skor dari setiap parameter digunakan indikator sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Semakin banyak informasi yang menjadi indikator penilaian setiap parameter, semakin tinggi nilai skor yang diberikan. Nilai skor yang digunakan berkisar antara 0-3. Nilai 0 diberikan apabila program daerah perlindungan laut memberikan dampak negatif terhadap pengembangan dan pengelolaan sumberdaya pesisir Pulau Sebesi. Nilai tertinggi 3, apabila program ini memberikan dampak yang optimal dalam pengembangan sumberdaya pesisir di Pulau sebesi. Dalam menentukan tingkat keberlanjutan, akuntabilitas, dan replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, digunakan tiga kategori berdasarkan nilai total skor dari setiap aspek di atas, yaitu: (1) Kategori Tinggi (2,1 - 3,0); (2) Kategori Sedang (1,1 - 2,0); dan (3) Kategori Rendah (0,0 - 1,0).

Tabel 4. Bobot dan skor untuk setiap parameter replikabilitas, akuntabilitas, dan replikabilitas

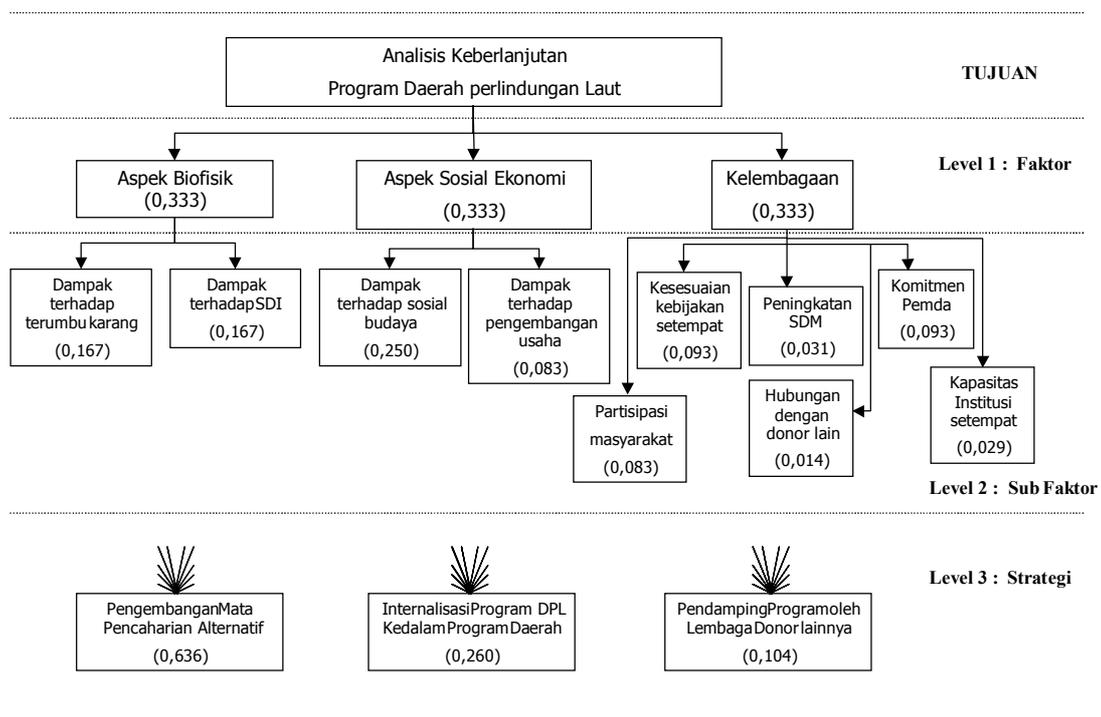
No	Parameter/Variabel	Bobot	Skor
A.	Aspek Keberlanjutan		
A1.	Aspek Biofisik	0,333	
	1. Dampak terhadap ekosistem terumbu karang	0,167	0-3
	2. Dampak terhadap sumberdaya ikan	0,167	0-3
A2.	Aspek Sosial Ekonomi Budaya	0,333	
	1. Dampak terhadap sosial budaya masyarakat	0,250	0-3
	2. Dampak terhadap pengembangan usaha	0,083	0-3
A2.	Aspek Kelembagaan	0,333	
	1. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat	0,093	0-3
	2. Komitmen Pemerintah Daerah dan institusi lokal lainnya	0,093	0-3
	3. Kapasitas institusi setempat	0,029	0-3
	4. Peningkatan sumberdaya manusia	0,031	0-3
	5. Partisipasi dari <i>stakeholders</i> utama	0,083	0-3
	6. Hubungan dengan donor lain	0,014	0-3
B.	Aspek Akuntabilitas		
	1. Efisiensi program daerah perlindungan laut	0,40	0-3
	2. Proses implementasi	0,20	0-3
	3. Efektifitas program/proyek	0,40	0-3
C.	Aspek Replikabilitas		
	1. Kelengkapan data dasar (<i>baseline data</i>)	0,30	0-3
	2. Relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi/situasi lokasi	0,20	0-3
	3. Dampak proyek terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan perilaku	0,30	0-3
	4. Penyerbarluasan informasi	0,20	0-3

daerah perlindungan laut, (b) proses implementasi pengembangan daerah perlindungan laut, dan (c) efektifitas daerah perlindungan laut dalam perbaikan ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat. Analisis replikabilitas program daerah perlindungan laut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, kemungkinan program ini dapat direplikasi ke tempat-tempat lain. Aspek replikabilitas dikaji dari 4 (empat) parameter, yaitu (a) ketersediaan data dasar (baseline data); (b) relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi dan situasi lokasi; (c) dampak terhadap lingkungan, ekonomi dan budaya; dan (d) penyebaran informasi daerah perlindungan laut.

Penentuan Bobot dan Skor

Penentuan bobot dari setiap parameter didasarkan pada tingkat kepentingan dari setiap parameter yang dikaji. Seperti terlihat pada Gambar 3, untuk menilai prospek keberlanjutan pengembangan daerah perlindungan laut terdapat 10 parameter, yaitu aspek biofisik dan sosial ekonomi budaya masing-masing 2 (dua) parameter dan aspek kelembagaan 6 (enam) parameter. Kesepuluh parameter di atas memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam menentukan keberlanjutan program daerah perlindungan laut.

Untuk menentukan bobot dari masing-masing parameter digunakan Proses Hierarki Analitik (*Analytical Hierarchy Process*, AHP) dengan rumusan permasalahan seperti disajikan pada Gambar 3. Metode ini pada dasarnya adalah mengkuantifikasi pendapat para *stakeholders* yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Hasil analisis bobot untuk setiap parameter yang mempengaruhi keberlanjutan daerah perlindungan laut disajikan pada Gambar 4.



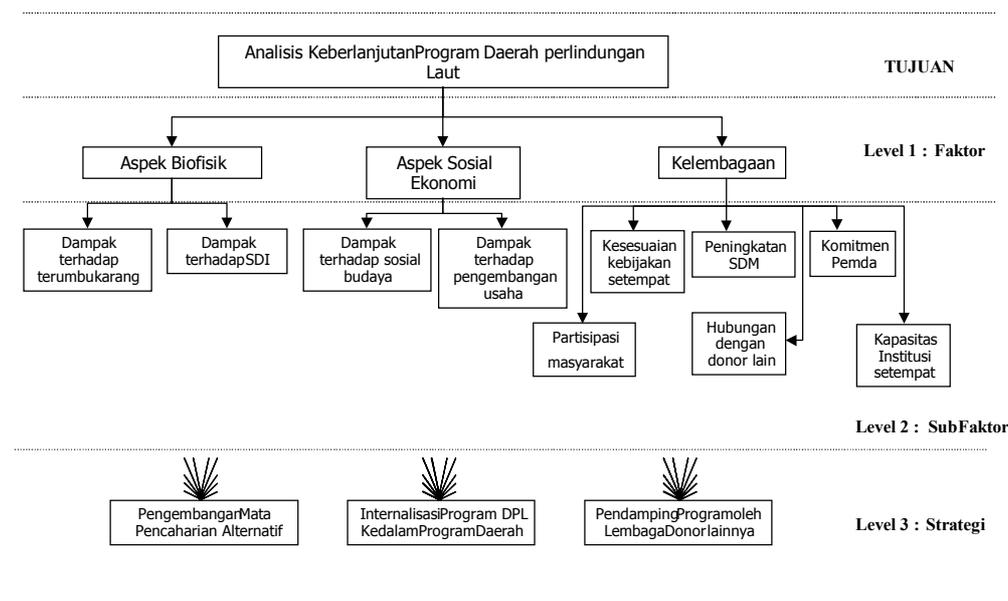
Gambar 4. Hasil analisis bobot untuk setiap parameter yang mempengaruhi keberlanjutan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

kelompok *stakeholders* di atas yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi. Adapun target responden dalam penelitian ini adalah seperti disajikan pada Tabel 3.

ANALISIS DATA

Penentuan Parameter

Secara umum kajian ini bertujuan untuk melihat aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan replikabilitas. Analisis keberlanjutan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemungkinan keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pada saat Proyek Pesisir di Provinsi Lampung berakhir pada bulan Desember 2002. Analisis keberlanjutan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek biofisik, sosial-ekonomi-budaya dan kelembagaan (Gambar 3). Secara biofisik, daerah perlindungan laut memiliki tingkat keberlanjutan yang prospektif apabila memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas terumbu karang dan sumberdaya ikan. Secara sosial-ekonomi-budaya, daerah perlindungan laut memiliki peluang keberlanjutan apabila dapat memberikan dampak terhadap perubahan atau perbaikan sosial-budaya masyarakat dan peningkatan ekonomi serta pengembangan usaha alternatif.



Gambar 3. Alur penentuan parameter keberlanjutan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

Secara kelembagaan, prospek keberlanjutan program daerah perlindungan laut dapat dilihat dari 6 (enam) parameter, yaitu (a) kesesuaian program daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat, baik kebijakan yang bersifat formal maupun informal pada setiap level (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi); (b) komitmen Pemerintah Daerah Lampung dan institusi lainnya yang terkait untuk mengembangkan daerah perlindungan laut; (c) kemampuan dari institusi lokal, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk oleh pengelola proyek; (d) penguatan sumberdaya manusia setempat; (e) partisipasi dari *stakeholders* dalam pengembangan daerah perlindungan laut; dan (f) hubungan antara proyek dengan donor lain.

Analisis akuntabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama pengembangan daerah perlindungan laut memiliki akuntabilitas yang tinggi. Untuk menilai aspek akuntabilitas pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi difokuskan pada 3 (tiga) parameter, yaitu (a) efisiensi program

METODOLOGI KAJIAN

Kebutuhan data dan Informasi

Data yang digunakan untuk menganalisis aspek keberlanjutan, akuntabilitas, dan replikabilitas program daerah perlindungan laut adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui diskusi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran berbagai pustaka yang ada. Secara umum data yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Data Biofisik

Data biofisik meliputi data potensi sumberdaya pesisir seperti ekosistem terumbu karang (luas dan kualitas, keanekaragaman, pola pemanfaatan selama ini), potensi perikanan (termasuk alat tangkap dan produksinya), dan ekosistem lainnya yang mendukung kegiatan ini.

b. Data Sosial Ekonomi dan Budaya

Data sosial ekonomi meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, persepsi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, kecenderungan masyarakat memanfaatkan sumberdaya laut dan sebagainya, serta keinginan masyarakat.

c. Data Kelembagaan

Data kelembagaan meliputi lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa (formal dan non formal), kapasitas lembaga (dilihat dari kemampuan menjabarkan program), interaksi lembaga dengan pihak luar, program yang dibuat oleh lembaga yang ada, dan sebagainya.

d. Peraturan dan perundangan

Meliputi seluruh peraturan dan perundangan baik pada level desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, baik secara langsung dan tidak langsung mendukung pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

Penentuan Responden

Responden yang diambil dalam kajian ini ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling dengan pertimbangan, bahwa responden adalah pelaku (individu atau lembaga) yang terlibat dalam pengembangan daerah perlindungan laut baik pada saat persiapan sampai pelaksanaan kegiatan di Pulau Sebesi, Lampung Selatan.

Responden terdiri dari para stakeholder, yaitu pemberi dana (donor), Pengelola Proyek (*Field Program Manager dan Extension Officer*), Pemerintah Daerah (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan anggota masyarakat di Pulau Sebesi. Penentuan kategori responden di atas didasarkan pada pengamatan selama ini, dimana kelompok-

Tabel 3. Daftar responden penilaian aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Stakeholder	Responden
1	Pemberi Dana	Pahala Nainggolan (Admin & Finance)
2	Pengelola Proyek	Budy Wiryawan (Field Program Manager) Irfan Y. (Extension Officer)
3	Pemerintah Sekdes Tejang Kabupaten Provinsi	M. Noor Lubis (Sekdes) Syaiful Rivani (Bappeda Lampung Selatan) Syahrul (DKP-Lampung Selatan) A. M. Rony (Pemda Lampung) Faizal (Bappeda Lampung) Elvisar (DKP Lampung)
4	Perguruan Tinggi	Ali Kabul Mahi (Dosen) Indra Gumay (Dosen)
5	LSM	Herza (Mitra Bentala)
6	Masyarakat	Ahyar Abu Busri HS Ahmad Yani Sayuti M. Yusuf Giyanto Yayan M Herman S Wawan

Untuk tahap selanjutnya dilakukan penyeleksian pulau-pulau kecil yang terdapat di Teluk Lampung. Sebagaimana diketahui di perairan Teluk Lampung terdapat sekitar 40 pulau kecil. Pulau-pulau tersebut ada yang berpenghuni, dan banyak di antaranya tidak dihuni (Pemda Lampung, 2001). Seperti halnya dalam pemilihan kawasan pesisir, penyeleksian pulau-pulau kecil juga dilakukan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh stakeholder. Berdasarkan kriteria seperti pada Box 2, maka pulau-pulau kecil yang terpilih dan memenuhi kriteria adalah pulau (a) Puhawang, (b) Legundi, (c) Sebesi-Sebuku.

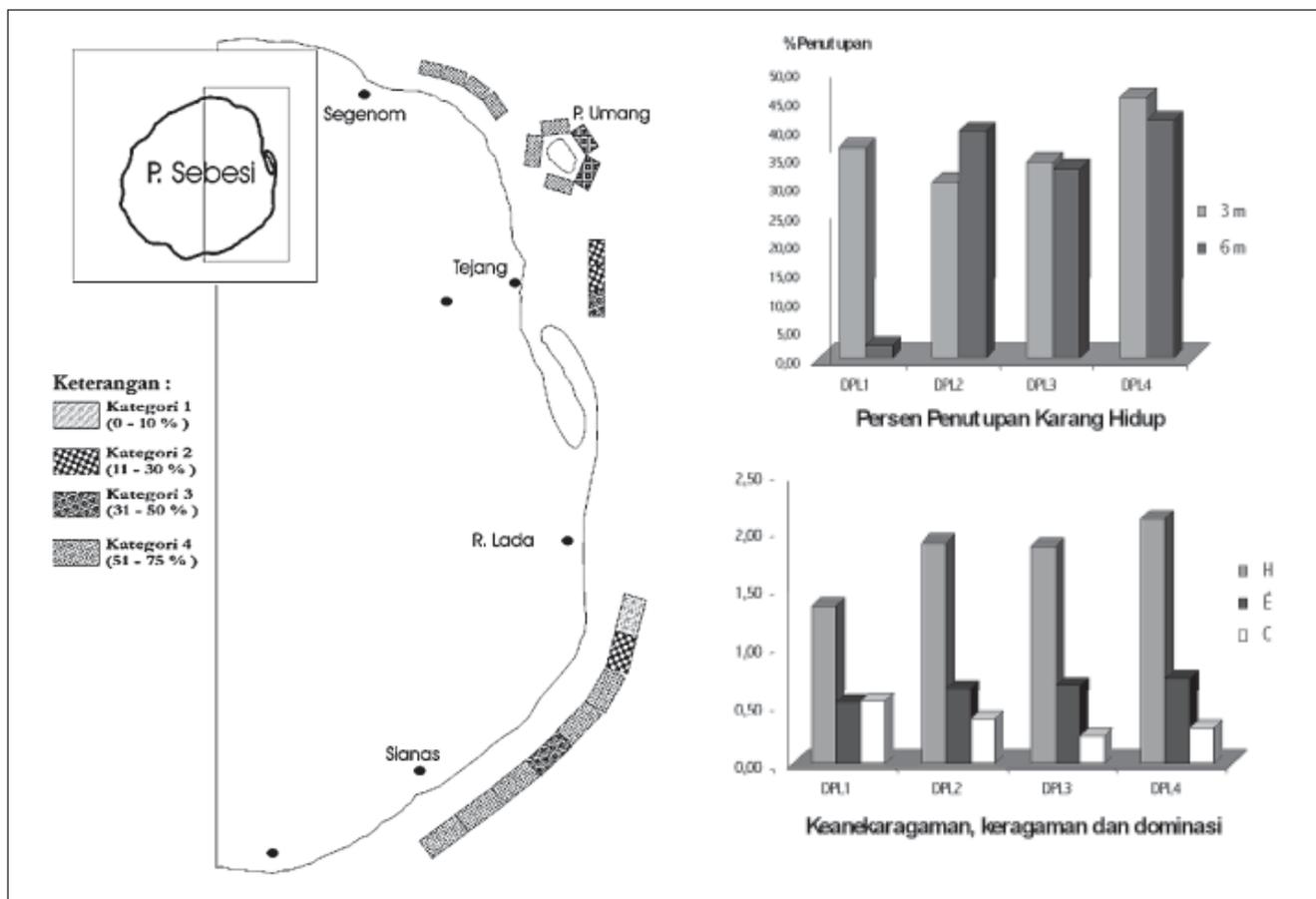
Box 2. Kriteria Penyeleksian Pulau-Pulau Kecil (Susanto, 2000)

- Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang berpenghuni atau berpenduduk;
- Kondisi terumbu karangnya relatif masih baik;
- Tingkat ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya cukup tinggi;
- Keinginan masyarakat terhadap pengelolaan pesisir cukup tinggi;
- Adanya dukungan dari pemerintah setempat.

Box 3. Kriteria Penentuan Daerah Pelindungan Laut (Susanto, 2000)

- Kondisi kualitas terumbu karang;
- Keanekaragaman hayati;
- Kondisi vegetasi mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
- Konflik penggunaan sumberdaya pesisir;
- Daya tarik wisata
- Aksesibilitas masyarakat dari dan ke pusat kota/keramaian;
- Keinginan dan pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
- Sanitasi lingkungan masyarakat.

Untuk menetapkan salah satu pulau dari keempat pulau di atas menjadi lokasi daerah perlindungan laut, maka pada awal bulan Juli 2000, diselenggarakan pertemuan *stakeholders* untuk membuat kriteria penetapan pulau kecil. Pada pertemuan tersebut telah disepakati kriteria pemilihan yang didasarkan pada aspek biofisik; aspek sosial ekonomi pertanian; dan aspek perikanan, seperti pada Box 3. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Pulau Sebesi ditetapkan sebagai lokasi pengembangan daerah perlindungan laut. Daerah perlindungan laut Pulau Sebesi memiliki empat kawasan perlindungan laut, yaitu DPL 1 di dusun Sianas, DPL 2 dan 3 di dusun Tejang dan DPL 4 di dusun Segenom, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

Tabel 2. Hasil monitoring sumberdaya ikan karang di lokasi daerah perlindungan laut Pulau Sebesi Bulan Maret 2002.

Lokasi	H		E		C		Spesies		Genus		Famili		Individu	
	3m	6m	3m	6m	3m	6m	3m	6m	3m	6m	3m	6m	3m	6m
DPL1	2,93	2,70	0,83	0,85	0,07	0,09	34	24	24	16	17	10	319	169
DPL2	2,47	1,84	0,80	0,64	0,14	0,31	23	17	17	12	11	10	207	167
DPL3	2,65	2,36	0,81	0,76	0,10	0,17	27	22	18	17	13	11	330	249
DPL4	2,27	2,18	0,78	0,80	0,17	0,17	19	16	14	12	9	9	207	187

Sumber : Prasetiawan (2002)

Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Pengembangan Daerah Perlindungan Laut(DPL) di Pulau Sebesi merupakan upaya masyarakat Pulau Sebesi untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumberdaya ekosistem terumbu karang dan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang. Tujuan dari daerah perlindungan laut adalah (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari.

Daerah perlindungan laut yang ditetapkan oleh masyarakat dibagi dalam dua zona atau kawasan, yaitu zona inti dan zona penyanggah, dimana pada zona tersebut diberlakukan ketentuan masing-masing. Namun pada dasarnya kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi sumberdaya laut, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelarangan penggunaan alat-alat penangkapan ikan pada daerah perlindungan laut adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang, yang pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi sumberdaya ikan yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang tersebut. Pemanfaatan hanya dilakukan secara terbatas dan menggunakan alat sederhana yang tidak merusak serta dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika sumberdaya ikan sudah mengalami pemulihan (*recovery*). Pada saat daerah perlindungan laut belum mampu menopang kehidupan masyarakat Pulau Sebesi, maka sistem sosial masyarakat Pulau Sebesi berupaya untuk mencari sumber-sumber energi (mata pencaharian alternatif) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan sistem akibat berkurangnya sumber energi dari laut. Oleh karena itu, sebagian anggota masyarakat (komponen sistem) mencari ikan di tempat lain di luar kawasan daerah perlindungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penentuan Pulau Sebesi sebagai kawasan daerah perlindungan laut dilakukan melalui dua tahap, yaitu pertama, penentuan wilayah pesisir di Provinsi Lampung dan kedua, pemilihan pulau kecil. Sebagaimana diketahui, wilayah pesisir Lampung secara umum dapat dibagi atas empat wilayah, yaitu pantai barat, pantai timur, Teluk Semangka dan Teluk Lampung, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk memilih salah satu wilayah pesisir tersebut sebagai lokasi pengembangan daerah perlindungan laut, dilakukan pemilihan lokasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Proyek Pesisir dan Pemda Lampung, seperti pada Box 1. Dari keempat wilayah pesisir Lampung di atas, maka pesisir Teluk Lampung merupakan wilayah pesisir yang memenuhi keempat kriteria yang telah ditetapkan.

Box 1. Kriteria Pemilihan Kawasan Pesisir Provinsi Lampung (Susanto, 2000)

- Wilayah tersebut memiliki pulau-pulau kecil;
- Wilayah tersebut terdapat isu-isu pengelolaan pesisir;
- Wilayah terpilih memiliki potensi pengembangan wisata bahari; dan
- Wilayah ini haruslah memiliki potensi sumberdaya pesisir, terutama terumbu karang.

penyeberangan satu kali dalam sehari. Selain dari Canti, akses ke Pulau Sebesi juga dapat ditempuh dari Cilegon Jawa Barat dengan menggunakan perahu motor yang biasanya mengangkut kelapa dan kopra (Pemda Lampung, 2001).

Penduduk pulau sebesi pada awalnya merupakan pendatang yang bekerja sebagai buruh di kebun kelapa yang dimiliki oleh tuan tanah, para buruh tersebut berdatangan ke Pulau Sebesi sejak 1913. Lama kelamaan buruh tersebut membentuk beberapa keluarga yang kemudian berkumpul membentuk sebuah kelompok. Sebagian besar penduduk di Pulau Sebesi bekerja sebagai buruh yaitu mencapai 57 % (365 jiwa). Sedangkan penduduk yang mempunyai pekerjaan selain buruh yaitu petani sebesar 17,2 % (110) jiwa, nelayan 16,7 % (107 jiwa), pedagang sebesar 1,4 % (9 jiwa), wiraswasta 6,6 % (42 jiwa), dan Pegawai negeri 1,1 % (7 jiwa). Penduduk Pulau Sebesi 58,2 % berasal dari Jawa (Jawa Tengah dan Banten), 32,2 % berasal dari Lampung, 8 % berasal dari Sunda, dan 1,6 % berasal dari Batak, Betawi, Padang, Palembang, dan Bima.

Ekosistem Terumbu Karang

Secara umum Pulau Sebesi dikelilingi oleh terumbu karang. Terumbu karang dapat ditemukan sampai kedalaman 10 meter dari permukaan air laut. Luas daerah terumbu karang di Pulau Sebesi dan Pulau Umang adalah 58,98 ha, dimana 31,64 ha berupa karang hidup dan penyusun terumbu karang lainnya dan 27,34 ha berupa karang mati, pecahan karang dan komponen abiotik. Hasil pengamatan terumbu karang yang dilakukan

pada bulan Maret (Tabel 1) menunjukkan bahwa penutupan karang hidup di Pulau Sebesi berkisar antara 2,65 % - 63,83 %, yang berarti kualitas terumbu karang di Pulau Sebesi termasuk kategori buruk sampai baik. Jenis-jenis karang yang ditemukan antara lain adalah *Millepora*, *Acropora*, *Caulastrea*, *Echinopora*, *Favia*, *Favites*, *Fungia*, *Goniastera*, *Goniopora*, *Hydnophora*, *Leptoria*, *Lamnelia*, dan *Lobophyton*.

Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas terumbu karang di DPL Pulau Sebesi

Lokasi	Parameter							
	H		E		C		% Penutupan	
	3m	6m	3m	6m	3m	6m	3m	6m
DPL1	1,36	1,50	0,53	0,63	0,55	0,34	27,10	10,06
DPL2	1,91	1,28	0,66	0,53	0,38	0,52	22,65	11,14
DPL3	1,88	1,86	0,68	0,68	0,24	0,38	37,60	44,98
DPL4	2,12	2,21	0,74	0,74	0,30	0,28	41,47	23,675

Sumber : Suhendra, 2002

Sementara itu, hasil monitoring Bulan Maret 2002 menunjukkan bahwa keanekaragaman ikan karang di daerah perlindungan laut pada kisaran sedang, kecuali pada DPL 4 dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perairan yang dijadikan lokasi daerah perlindungan laut dalam kondisi tekanan lingkungan kuat sampai sedang. Dilihat dari jumlah spesies, sumberdaya ikan karan yang terdapat di daerah perlindungan laut Pulau Sebesi berkisar antara 19-34 spesies, dengan jumlah genus antara 14-24 genera dan jumlah famili antara 9-17 famili. Sementara itu jumlah individu yang ditemukan di masing-masing daerah perlindungan laut berkisar antara 207-330 individu. Untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi, Putra (2001) telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi adalah sebesar Rp. 1.919.500.650,-. Nilai ini hanya merupakan manfaat langsung yang dihitung berdasarkan hasil tangkapan nelayan, sedangkan manfaat tidak langsung belum dimasukkan dalam perhitungan nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi. Hasil monitoring ikan karang yang dilakukan pada Bulan Maret 2002 disajikan pada Tabel 2.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika Program *Coastal Resources Management Project* (CRMP) atau lebih populer disebut Proyek Pesisir dirancang dan mulai dilaksanakan 6 tahun yang lalu (1996), salah satu harapan dari perancang dan pelaksana program ini adalah diadopsinya program ini oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, program yang telah berlangsung lama dengan pendanaan yang tidak sedikit, tidak berakhir seiring dengan berhentinya bantuan pendanaan dari donor. Harapan ini sangat beralasan, karena bila disimak betapa banyak program-program sejenis yang telah dilaksanakan di Indonesia, namun sebagian besar dari program tersebut berakhir seiring dengan berhentinya bantuan dari donor. Padahal bila ditinjau dari segi lingkup kegiatan, program-program pengelolaan pesisir di Indonesia selama ini sudah cukup luas. Menurut Dahuri (1999), lingkup program pengelolaan pesisir Indonesia yang ada saat ini sebanyak 9 aspek, yaitu : (1) penataan dan pengembangan sistem pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan; (2) penguatan kelembagaan pendidikan, penelitian dan pengelolaan; (3) rehabilitasi, pelestarian dan konservasi lingkungan pesisir dan lautan; (4) pengembangan data dasar dan sistem informasi; (5) pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir; (6) pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir; (7) pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pesisir dan lautan; (8) pengembangan perdagangan jenis komoditas pesisir dan lautan yang sesuai dengan kaedah perlindungan lingkungan; dan (9) pengembangan mata pencaharian alternatif bagi penduduk di kawasan pesisir.

Lalu apa sebenarnya yang membuat suatu program tidak berjalan ketika program tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan dari pemberi dana lagi?. Satu jawaban yang ‘mungkin’ benar adalah karena program tersebut belum diadopsi secara formal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Proyek Pesisir yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan pendekatan dua arah (*two-track approach*). Dalam arti, dari bawah (tingkat desa, kabupaten dan provinsi) mengembangkan working models (proyek percontohan) tentang penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Dutton, 2000).

Salah satu proyek percontohan yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir adalah daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pengembangan program daerah perlindungan laut, merupakan implementasi Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung. Program ini adalah suatu upaya untuk mengatasi isu pengelolaan pulau-pulau kecil yang terdapat di Provinsi Lampung. Pada tahap awal pengembangan program ini, antusiasme dan dukungan masyarakat serta pemerintah cukup tinggi untuk mengembangkan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah inisiator program (Proyek Pesisir) mengakhiri bantuannya pada Bulan Desember 2002, daerah perlindungan laut Pulau Sebesi masih dapat berlanjut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir sebelum mengakhiri programnya di Provinsi Lampung adalah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program yang telah diinisiasi. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut ini, evaluasi dilakukan untuk mengkaji aspek keberlanjutan (*sustainability*), akuntabilitas (*accountability*), dan replikabilitas (*replicability*).

LAMPIRAN

Program Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi, Lampung Selatan

(Tinjauan Aspek Keberlanjutan, Akuntabilitas dan Replikabilitas)

kepada masyarakat tentang berorganisasi dan pemahaman tentang posisi kekuatan dari suatu organisasi. Sedangkan pelatihan pengolahan ikan dilaksanakan oleh jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya ibu-ibu bagaimana mengolah ikan dengan mutu yang baik.

Partisipasi Masyarakat

Ketika inisiator program menetapkan Pulau Sebesi sebagai lokasi implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah adanya keinginan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Alasannya adalah apabila kriteria ini dipenuhi maka diharapkan program-program perlindungan sumberdaya laut akan mudah diterima oleh masyarakat dan tentunya keterlibatan mereka dalam program tersebut tinggi. Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengelolaan pesisir, terdapat tiga tingkatan partisipasi, yaitu partisipasi sebatas pada memberi informasi (tingkat informasi), partisipasi sebatas target konsultasi, dan partisipasi sebagai pemilik program. Dalam pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, partisipasi tingkat informasi terjadi pada saat inisiator program akan memilih satu pulau dari beberapa pulau untuk dijadikan lokasi implementasi program. Partisipasi tingkat konsultasi terjadi pada saat inisiator baru memulai menempatkan penyuluh lapangan di Pulau Sebesi. Sedangkan partisipasi tingkat pemilik terjadi pada saat inisiator sudah membentuk Kelompok Badan Pengelola. Setelah berjalan sekitar setahun, inisiator program telah membentuk Badan Pengelola daerah perlindungan laut yang beranggotakan 22 orang yang berasal dari masyarakat Pulau Sebesi.

Semenjak dibentuk, Badan Pengelola inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Inisiator program melalui staf penyuluh lapangan hanya menjadi pendamping dalam meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Pengelola. Dengan demikian, tingkat partisipasi dari *stakeholders* dalam program daerah perlindungan laut ini adalah sebagai pemilik dan diharapkan mampu menjalin kerjasama antar lembaga yang ada di Pulau Sebesi sehingga tercipta sistem pengelolaan yang terpadu di antara komponen *stakeholders*.

Keberlanjutan DPL Berbasis Masyarakat

Untuk menjaga agar program daerah perlindungan laut ini benar-benar terus berlanjut, sehingga tujuan dari perlindungan sumberdaya alam pesisir Pulau Sebesi dapat dicapai, terdapat tiga strategi yang perlu dijalankan. Ketiga strategi tersebut adalah:

- *Pertama:* Mengembangkan mata pencaharian alternatif sebagai kompensasi dari tidak dimanfaatkannya sumberdaya pesisir yang terdapat di kawasan daerah perlindungan laut. Mata pencaharian alternatif yang disarankan adalah pengembangan keramba terutama keramba dasar, pengembangan rumpon dan pengembangan pengolahan hasil-hasil laut.
- *Kedua:* Internalisasi program daerah perlindungan laut ke dalam program tahunan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan daerah perlindungan laut senantiasa mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah.
- *Ketiga:* adalah adanya program pendampingan lanjutan oleh lembaga donor lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir selama ini.

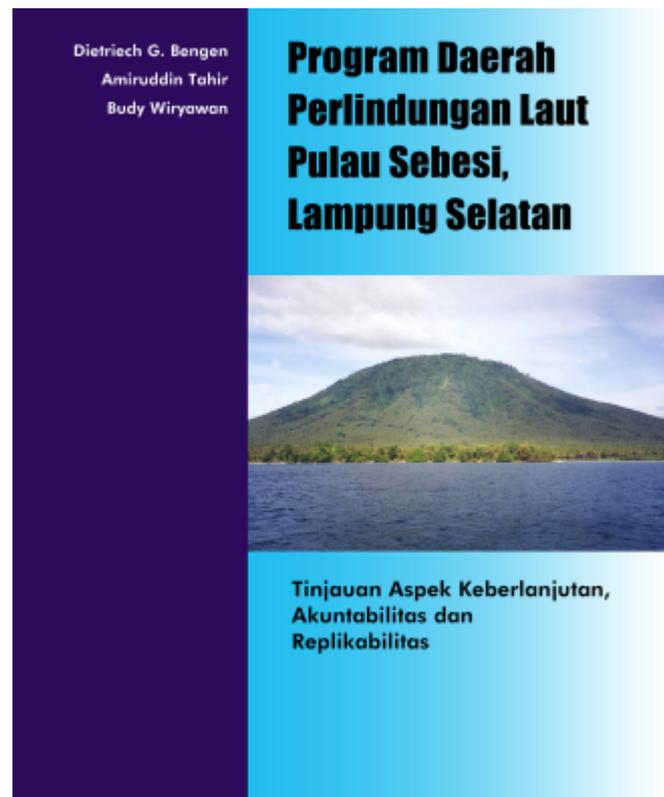
dan meningkatkan kualitas sumberdaya lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang. Tujuan dari daerah perlindungan laut adalah (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari.

Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang akan melanjutkan program ini, dilaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pendampingan dan penyediaan bantuan teknis. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang telah dilaksanakan adalah (1) pengiriman anggota masyarakat ke Sulawesi Utara untuk studi banding tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Desa Blongko, Talise, dan Taman Nasional Bunaken; (2) pelatihan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat untuk penyiapan kader di Desa Tejang Sebesi dan Pematang Pasir; (3) pelatihan pengolahan hasil perikanan tradisional; dan (4) pelatihan monitoring (manta tow). Program-program di atas, secara langsung atau tidak langsung telah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di Pulau Sebesi, terutama dalam hal (a) terbentuknya Badan Pengelola daerah perlindungan laut; (b) kemampuan masyarakat membuat aturan pengelolaan daerah perlindungan laut; dan (c) kemampuan memahami permasalahan pengelolaan terumbu karang (monitoring terumbu karang).

Program lain yang dilakukan adalah program pendampingan masyarakat yang akan membantu masyarakat setempat dalam mempersiapkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu (1) penempatan *Extension Officer* (penyuluh lapangan dari luar Pulau Sebesi) satu orang mulai dari awal sampai akhir; dan (2) pengangkatan asisten penyuluh lapangan dari masyarakat setempat (dua orang). Penyuluh lapangan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen proyek dan masyarakat desa. Tugas penyuluh lapangan adalah (a) fasilitator dan mediator antara proyek pesisir, pemerintah dan masyarakat; (b) membantu proses pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan tanggungjawab terhadap proyek; dan (c) membangun motivasi masyarakat desa dalam upaya pengelolaan pesisir.

Selain program pendampingan, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis. Bantuan teknis yang telah dilakukan adalah (a) tenaga asistensi monitoring terumbu karang (Mahasiswa IPB); (b) pelatihan pengolahan ikan dan (c) pelatihan tentang organisasi. Pelatihan monitoring terumbu karang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dan pengelola daerah perlindungan laut bagaimana melakukan monitoring terumbu karang. Pelatihan organisasi dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Bentala yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan



Lampung, Balai Budidaya Laut dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili LSM Watala dan LSM Mitra Bentala, sedangkan dari unsur swasta diwakili oleh Gappindo, PHRI, ASITA, APPU, dan sebagainya.

Meskipun secara umum seluruh *stakeholders* berperan aktif dan terlibat hampir dalam setiap tahapan dan aktivitas yang dilakukan, namun pada dasarnya masing-masing unsur *stakeholders* memiliki peran yang spesifik dalam penyusunan Renstra Pesisir ini. Peran spesifik ini tergantung pada tugas dan fungsi dari masing-masing unsur. Adapun peran spesifik tersebut, misalnya (1) masyarakat umum berperan dalam memberikan berbagai informasi yang lebih lengkap dan aspirasi-aspirasi mereka yang dapat dijadikan masukan bagi penyusunan rencana strategis; (2) pemerintah berperan sebagai penggagas kebijakan dan strategi pengelolaan; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan informasi tambahan yang pada umumnya belum dapat diberikan oleh masyarakat, misalnya berbagai kendala yang dihadapi dalam masyarakat; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai penguat bagi keabsahan Renstra Pesisir; (5) swasta berperan sebagai pendukung dalam penyediaan informasi terutama yang terkait dengan mereka; dan (6) Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian berperan dalam memberikan arahan-arahan dalam penyusunan Renstra Pesisir.

Pelibatan segenap unsur *stakeholders* di atas, selain menghasilkan Renstra Pesisir yang partisipatif, juga memberikan berbagai manfaat lainnya. Manfaat dari keterlibatan *stakeholders* tersebut adalah (1) meningkatkan rasa kepemilikan diantara setiap unsur *stakeholders* terhadap Renstra Pesisir; (2) terciptanya kesepakatan-kesepakatan atau kompromi diantara *stakeholders*; (3) meminimalisasi kemungkinan konflik atau hambatan yang dihadapi pada saat implementasi Renstra Pesisir; (4) dengan keterlibatan seluruh segenap unsur *stakeholders* sejak awal sudah merupakan sosialisasi awal dari Renstra Pesisir

Pembelajaran

- Agar mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi dan keinginan masyarakat, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan Renstra Pesisir adalah (1) kumpulkan berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir; (2) lakukan diskusi secara intensif dan secara berkala dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi tersebut; (3) libatkan LSM-LSM dalam menggali aspirasi masyarakat; (4) kombinasikan aspirasi masyarakat dengan tujuan pembangunan lainnya (aspirasi dari komponen *stakeholders* lainnya).
- Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif tersebut beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) identifikasi dan libatkan *stakeholders* kunci dan berpengaruh dalam masyarakat; (2) posisikan setiap unsur *stakeholders* pada level yang sama (tidak ada yang merasa lebih penting); (3) sedapat mungkin laksanakan setiap kegiatan yang dapat mengikutsertakan *stakeholders* seluas mungkin.
- Untuk mendapatkan kontribusi optimal tersebut, maka dalam penyusunan suatu Renstra perlu melakukan hal-hal sebagai berikut (1) identifikasi peran-peran spesifik dari masing-masing komponen *stakeholders*; (2) berikan tanggungjawab yang lebih besar kepada setiap komponen *stakeholders* berdasarkan peran spesifik tersebut; dan (3) hindari hal-hal yang dapat mengurangi kontribusi setiap komponen *stakeholders* (misalnya jangan berikan peran yang tidak disenangi).

PENGELOLAAN PESISIR BERBASIS MASYARAKAT

Salah satu implementasi pengelolaan pesisir berbasis masyarakat yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan upaya masyarakat Pulau Sebesi untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumberdaya dan ekosistem terumbu karang, serta sekaligus mempertahankan

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Sebagai produk perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Pesisir Lampung memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan Provinsi Lampung, kedudukan Renstra Pesisir adalah (1) memberikan arahan formulasi, pengendalian dalam penyusunan prioritas program, (2) mengarahkan dan memprioritaskan pengelolaan di suatu wilayah pesisir, dan (3) memberikan sumbangan dalam perumusan sasaran pembangunan.

Untuk mampu mengarahkan pengelolaan wilayah pesisir secara menyeluruh (komprehensif), Renstra disusun berdasarkan isu-isu pengelolaan yang muncul di wilayah pesisir Lampung, baik dari aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta kelembagaan.



Partisipasi Stakeholder

Proses penyusunan Renstra Pesisir Lampung dilakukan dengan sangat partisipatif yang melibatkan seluruh komponen *stakeholders* pesisir di Provinsi Lampung, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian serta media massa. Dari unsur pemerintah, selain Bappeda juga melibatkan seluruh lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan Laut, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Bapedalda, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas PU Pengairan dan sebagainya. Dari unsur masyarakat diikuti baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ketua-ketua kelompok dalam masyarakat, maupun anggota masyarakat umum. Dari unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian diikuti oleh Universitas



beranggotakan berbagai unsur dari perguruan tinggi, pemerintah dan LSM. Hasil analisis selanjutnya diverifikasi kembali pada setiap tingkatan untuk mengetahui bahwa data tersebut benar-benar sudah absah.

Partisipasi *stakeholders*

Proses penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen *stakeholders* pesisir di Provinsi Lampung, yaitu

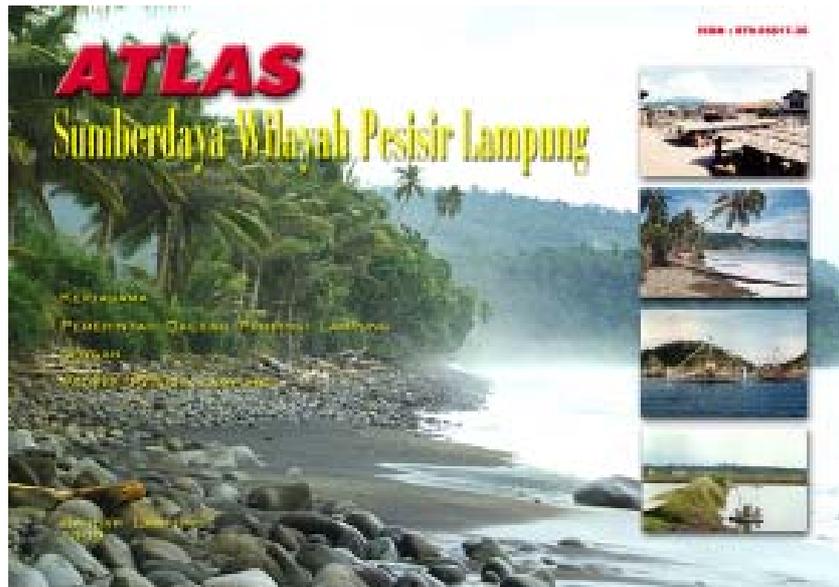
unsur pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian serta media massa. Dari unsur pemerintah, selain Bappeda juga harus melibatkan seluruh lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan Laut, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Bapedalda, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas PU Pengairan dan sebagainya. Dari unsur masyarakat diikuti baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ketua-ketua kelompok dalam masyarakat, maupun anggota masyarakat umum.

Secara formal jumlah orang yang terlibat dalam penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung adalah 176 orang yang terdiri dari 26 orang tim teknis, 50 orang *volunteer*, 10 orang staf Pemda Lampung, 30 orang LSM dan Swasta, 20 orang media massa, dan 40 orang CRC-URI, perguruan tinggi, Ditjen Bangda, dll.

Pembelajaran

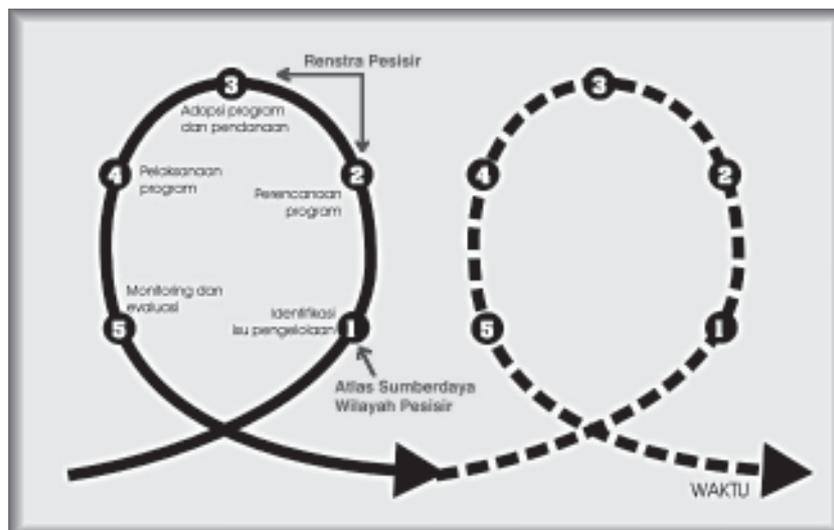
Dalam proses adopsi oleh pihak lain (pemerintah daerah), perhatian khusus perlu diberikan terutama pada proses pengumpulan data dan informasi, baik data primer maupun sekunder, proses verifikasi dan klarifikasi dari instansi pemerintah yang menerbitkan data tersebut, serta format penyajian. Proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan beragam pihak, sehingga memerlukan kesabaran untuk mencapai konsensus tentang informasi yang disajikan dalam Atlas. Jika proses ini dilakukan secara seksama, niscaya atlas yang disusun ini mempunyai kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar bagi perencanaan wilayah pesisir secara terpadu.

Sebagai suatu produk atlas pesisir yang pertama, Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung menjadi model bagi beberapa daerah untuk menyusun Atlas Sumberdaya Pesisir. Beberapa daerah yang telah mengadopsi atlas tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Bali, Riau, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.



PENDAHULUAN

Dalam mengemban misinya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Proyek Pesisir menggunakan pendekatan dua arah (*two-track approach*). Dalam arti, dari bawah (tingkat desa, kabupaten dan provinsi) mengembangkan *working models* (proyek percontohan) tentang penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melalui kegiatan seminar, konperensi, advokasi dan publikasi (Dutton, 2000). Untuk studi kasus perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir di Provinsi Lampung (1998-2002), terdapat tiga *output* yang dapat diangkat sebagai suatu pembelajaran, yaitu (1) Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, (2) Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung, dan (3) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat. Secara konseptual, pengembangan pengelolaan pesisir di Provinsi Lampung mengikuti suatu siklus yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Identifikasi Isu Pengelolaan, Perencanaan Program, Adopsi Program dan Penadanaan, Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi (Gambar 1).



Gambar 1. Siklus Perencanaan Pengelolaan Pesisir Lampung

PENYUSUNAN ATLAS SUMBERDAYA PESISIR

Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung sebagai kumpulan data dan informasi tentang potensi dan permasalahan pengelolaan pesisir di Lampung merupakan basis bagi penyusunan rencana pengelolaan lebih lanjut. Sebagai basis perencanaan pengelolaan, penyusunan atlas ini menekankan pada dua hal penting, yaitu kelengkapan data dan informasi yang akurat dan penerimaan serta pengakuan *stakeholders* terhadap keberadaan Atlas Sumberdaya Pesisir. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan melibatkan berbagai pihak yang mampu memenuhi dua tuntutan tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi akurat, pengumpulan data dilakukan dari level desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dalam proses pengumpulan data, selain pendekatan partisipatif, pendekatan ilmiah juga dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian seperti IPB dan UNILA. Data tersebut dianalisis oleh tim teknis yang